

SPIRIT DAN ETIKA BIROKRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Salmiah¹, I Nyoman Subanda²

Program Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
Denpasar

Email : miahikmawan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Spirit dan etika birokrasi ASN di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Spirit dan etika birokrasi ASN di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng telah Etika Birokrasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng, secara keseluruhan baik, hal ini di indikasikan dari ketiga aspek etika yang digunakan aspek tujuan dan aspek Sarana (modalitas) sudah terlaksana dengan baik, aspek sarana (modalitas) sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian dan berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat Etos Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng adalah sebesar 83,95% dan ini berada pada interval 76% - 100% atau termasuk dalam kategori *baik*.

Kata Kunci :Etika; Birokrasi; DPRD

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam suatu organisasi, yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi semua orang manusiawi yang melekat keberadaanya melalui potensi fisik dan non fisik. Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia mempunyai peran masing-masing sesuai tanggung jawab dalam pekerjaannya. Di era global seperti saat ini dimana tingkat persaingan begitu kompetitif, maka setiap organisasi membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Profesionalitas sangat ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tupoksinya dan tingkatannya masing-masing. Salah satu harapan masyarakat, selaku konsumen pelayanan adalah menginginkan pelayanan yang adil dan merata yang hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrasi pemerintah yang senantiasa menyesuaikan pelayanannya. Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Istilah

birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal yang disebut birokrasi merupakan bentuk yang diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah.

Sekretariat DPRD sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun tugas pokok dan fungsi adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya anggota DPRD sehingga sangat dibutuhkan pegawai-pegawai memiliki keterampilan dan profesionalitas yang seimbang dengan tuntutan. Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Istilah birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal yang disebut birokrasi merupakan bentuk yang diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah. Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Birokrasi merupakan proses atau upaya yang sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik serta birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Berbagai macam permasalahan dihadapi oleh aparatur birokrasi, maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka diperlukan sebuah pemikiran baru untuk membangun aparatur birokrasi Indonesia yang handal, profesional dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik.

Perlunya semangat atau *spirit* dalam bekerja dan memberikan pelayanan mampu mencerminkan kepribadian organisasi sehingga harapannya tujuan organisasi dapat terwujud. Etos kerja merupakan bagian penting dari keberhasilan manusia, baik dalam komunitas kerja yang terbatas maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Pegawai harus memiliki etos kerja terhadap pekerjaannya sehingga pekerjaan yang dihasilkan mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik yang dapat dilihat melalui prestasi kerja.

Faktor etos kerja sangat berpengaruh dengan prestasi kerja pegawai. Etos kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya dapat menghasilkan nilai prestasi yang baik. Dimana etos kerja ini merupakan sikap hidup yang didasari oleh pandangan masyarakat yang kemudian menghasilkan pandangan yang berwujud sebagai kerja atau bekerja. Etos kerja yang dimaksud disini adalah penanaman semangat untuk bekerja dan berkreativitas. Karena sikap yang bermalasan dan tidak kreatif merupakan cerminan sikap yang tidak memiliki etos kerja. Etos kerja yang dimiliki oleh seseorang terindikasi dari rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang di gelutinya, selain dari itu membudayakan diri dari disiplin dalam hal memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang di bebankan. Karena hal tersebut merupakan penentu terhadap keberhasilan dan produktivitas kerja.

Selain berbicara mengenai etos kerja yaitu semangat atau spirit yang dimaksud, pelayanan public juga perlu memperhatikan tentang etika birokrasi, bahwa dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok yaitu fungsi pelayanan. Jadi berbicara tentang etika birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya di mana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. Aparat birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada publik perlu mengetahui dimensi-dimensi etika untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya yang beretika. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bernhard Sutor dalam Haryatmoko (2011:4-6), etika publik harus memperhitungkan dimensi tujuan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan. Oleh karena itu sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada di Kabupten Buleleng, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng perlu memiliki Komitmen dan keinginan dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi yang dimiliki sebagai upaya dalam pencapaian

tujuan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik meneliti tentang Spirit dan etika birokrasi ASN di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng.

Tinjauan Teori

Menurut Uswatun Khasanah (2004 : 9), “etos kerja merupakan rujukan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam mengaktualisasikan diri dalam membentuk kerja. Rajutan nilai-nilai tersebut dapat mencakup nilai social, agama, budaya, serta lingkungan dimana anda selama ini banyak melakukan interaksi hidup”. Pendapat tersebut juga menjelaskan bahwa etos kerja adalah hasil dari realisasi cara pandang kita dalam bekerja yang sesuai dengan nilai-nilai social, Agama, budaya, serta lingkungan. Selanjutnya Ishak Arep dan Hendri Tanjung (2003 : 156), menyatakan bahwa “etos diturunkan dari kata etika”. Menurut Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Sudiman Tebba (2003:1) bahwa etos kerja adalah semangat dan sikap batin tetap seseorang atau kelompok orang sejauh di dalamnya terdapat tekanan moral dan nilainilai moral tertentu. Sinamo (2005) lebih memilih menggunakan istilah etos karena menemukan bahwa kata etos mengandung pengertian tidak saja sebagai perilaku khas dari sebuah organisasi atau komunitas tetapi juga mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, *spirit* dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip -prinsip, maupun standar-standar. Melalui berbagai pengertian diatas baik secara etimologis maupun praktis dapat disimpulkan bahwa Etos Kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya.

Pengertian Kinerja Birokrasi Publik

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosendtono dalam Widodo 2001). Kinerja birokrasi merupakan perihal yang penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap kinerja birokrasi akan sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan; mendorong birokrasi untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani serta untuk melakukan perbaikan pelayanan publik

(Keban, 1995). Kinerja organisasi didefinisikan Rue dan Byars dalam Keban (1995:1), sebagai tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplisinent*), karena itu kinerja organisasi dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban, 1995:1). Menurut McClelland dalam , pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja (Zulkarnaen, W., et.all. 2018:49). Definisi lain yang juga memandang kinerja secara internal, hanya membandingkannya dengan tujuan organisasi, dikemukakan Gordon (1993:332) bahwa "*performance refers specifically to performing and reaching group goal through fast workspeed; outcomes of high quality, accuracy, and quantity; observation of rules*".

Kinerja organisasi menurut Perry (1989:619-626) akan menunjuk pada efektivitas organisasi, di mana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan. Isu efektivitas organisasi dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, menurut Hodge, Anthony dan Gates (1996) mencakup *how well the organization is doing*, bagaimana suatu organisasi mencapai profit/tujuannya dan tingkat kepuasan dari para pelanggan/pengguna jasa pelayanannya. Efektivitas organisasi secara internal mencakup efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan faktor-faktor hubungan manusia (*conflic, happy, satisfied*) yang akan mempengaruhi produktivitas. Kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan Boyatzis dalam Perry (1989:619-626) dilakukan untuk mencapai *specific result (outcomes)* yang hal itu akan dapat tercapai melalui adanya kebijakan, prosedur dan kondisi lingkungan organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagaimana metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertentu secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan & Taylor dalam Moleong, 2005:128). Nasir (2003:54), bahwa metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki. Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Waktu penelitian akan dilakukan selama 2 (tiga) bulan, dari Januari – Februari 2020 .

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yaitu pegawai yang berada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Informan ditentukan sebanyak 5 orang, sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dapat diperoleh dari informan yang telah ditetapkan secara purposive dari hasil kegiatan wawancara dan penyebaran kuesioner dengan informan penelitian di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai penunjang penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan, Peristiwa, Dokumen dan catatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dipecahkan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik : Observasi, Kuesioner, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama. Teknik analisis data dipergunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman, (1994:10-12). Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Birokrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, tujuan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan baik anggota DPRD Kabupaten Buleleng maupun masyarakat dalam pelayanan yang dilakukan berdasarkan tujuan pelayanan dengan baik yang relevan dan berkualitas. Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah berupaya untuk memberikan pelayanan yang beretika kepada anggota DPRD dan masyarakat kabupaten Buleleng untuk mendukung kinerja anggota DPRD, bagitu juga kepada masyarakat yang berurusan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Pegawai telah mengupayakan untuk memberika pelayanan yang beretika sebagai mana tujuan dari fungsi pelayanan yang dimiliki. Tujuan dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai

di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat memenuhi harapan dari anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Buleleng, seperti dalam membantu kelancaran persidangan dalam hal mempersiapkan bahan-bahan persidangan berkaitan dengan pembahasan Raperda. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan relevan dengan pelayanan yang dimiliki, namun demikian masih perlu rasanya untuk meningkatkan Sumber daya manusia untuk lebih mengoptimalkan kinerja pelayanan dalam memberikan pelayanan anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Etika birokrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah baik yang dilihat dalam hal tujuan pelayanan yang berkualitas. Upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada anggota DPRD kabupaten Buleleng sudah merupakan tujuan utama yang mengedepankan etika pelayanan karena tujuannya untuk kepuasan anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Buleleng yang dilayani berkaitan dengan tugas. Selain kepuasan anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang dilayani, tujuannya adalah untuk memberikan nilai-nilai etika yang harus jadi acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang dilakukan pada proses perumusan kebijakan.

Sejalan dengan hasil pengamatan peneliti dilapangan, di mana peneliti melihat bahwa pelayanan di bagian sudah terlihat sesuai dengan harapan anggota DPRD kabupaten Buleleng, serta sudah sesuai dengan tujuan pelayanan yang berkualitas, serta relevan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Sebagaimana dikemukakan oleh Ricoeur dalam (Haryatmoko,2011:4) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, salah/benar perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berdasarkan hasil dari pendapat yang dikemukakan oleh informan penelitian serta pengamatan lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa etika birokrasi yang dilihat dari tujuannya memberikan pelayanan telah menunjukkan tujuan pelayanan yang berkualitas dan relevan, ini memberikan makna bahwa etika birokrasi dalam hal tujuan adalah baik. Baik yang dimaksud yaitu baik dalam memberikan pelayanan dalam arti sesuai etika.

Sarana (Modalitas) Etika birokrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang dimaksud dengan Sarana (modalitas), merupakan sumber daya aparatur dan sarana

dalam pencapaian tujuan dengan membangun institusi yang adil dalam pelayanan dengan jalan memanfaatkan sarana pelayanan dengan baik dan sesuai aturan. Penggunaan sarana demi tercapainya tujuan pelayanan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peruntukannya diserahkan kepada pejabat. Penggunaa sarana digunakan untuk kelancaran pelaksanaa programprogram yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Penggunaa sarana prasarana pada Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng semaksimal mungkin untuk digunakan menjalankan tugas, namun kemudian digunakan untuk urusan pribadi selama tidak mengganggu tugas pokok serta sarana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hasil wawancara dengan infroman penelitian, sejalan dengan hasil pengamatan peneliti yang menggambarkan bahwa pegawai memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Buleleng sebagaimana tugas, pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan sarana yang ada dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mempermudah kerja anggota anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Selain itu, menunjukkan bahwa pegawai memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Buleleng berdasarkan etika yang dimilikinya sehingga segala sesuatu yang dilakukan atas sarana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said (2009:189), mengatakan bahwa etika birokrasi ialah karakter individu atau kelompok individu, dalam hal ini aparatur birokrasi secara individual atau kolektif, dalam memahami dan memperlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi. Artinya etika birokrasi adalah sifat dari individu/kelompok dalam memahami dan menjalankan tugas sebagai aparatur. Sehingga aparatur birokrasi memahami apa yang perlu untuk dilakukanya baik itu dalam melaksanakan tugas maupu dalam penggunaa sarana yang disediakan demi mendukung pelaksanaa tugas tersebut. Dengan demikian melihat hasil wawancara dan pengamatan dilapangan serta merujuk pada teori yang relevan dengan kondisi penelitian, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa etika Birokrasi Pada ASN Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng berkaitan dengan sarana (modalitas) bahwa penggunaan sarana pelayanan yang berikan dilakukan sudah membantu pelaksanaa tugas dan fungsi karena semua itu merupakan inventaris yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaa tugas. Untuk itu dapat dikatakan dalam hal sarana menunjukkan bawa etika birokrasi sudah baik.

Pada hasil pengamatan spirit ASN yang dituangkan dalam Etos Kerja bahwa setelah semua data hasil penelitian diuraikan dan dideskripsikan seperti di atas, maka berikut ini data hasil penelitian tersebut di analisis untuk mengetahui sampai sejauhmana etos kerja pegawai dan untuk menjawab perumusan masalah di dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil rekapitulasi setiap indikator penelitian pada Tabel 1, maka dapat diketahui bahwa :

- a. Frekuensi pilihan jawaban A = 0
- b. Frekuensi pilihan jawaban B = 0
- c. Frekuensi pilihan jawaban C = 68,7
- d. Frekuensi pilihan jawaban D = 252,6
- e. Frekuensi pilihan jawaban E = 164,7

Untuk mendapatkan persentase rata-rata dari data tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 : 5$$

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas maka dapat diketahui sebagai berikut :

$$\begin{aligned} N &= Fa + Fb + Fc + Fd + Fe \\ &= 0 + 0 + 68,7 + 252,6 + 164,7 \\ &= 486 \end{aligned}$$

Selanjutnya adalah mencari nilai F dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan jawaban, yaitu :

- a. Jawaban A diberikan bobot 1
- b. Jawaban B diberikan bobot 2
- c. Jawaban C diberikan bobot 3
- d. Jawaban D diberikan bobot 4
- e. Jawaban E diberikan bobot 5

Berdasarkan bobot tersebut di atas, maka dapat diperoleh nilai F sebagai berikut :

- a. $Fa = 0 \times 1 = 0$
- b. $Fb = 0 \times 2 = 0$
- c. $Fc = 68,7 \times 3 = 206,1$
- d. $Fd = 252,6 \times 4 = 1.010,4$

$$e. \quad Fe = 164,7 \times 5 = 823,5$$

Dengan demikian nilai F adalah : $206,1 + 1.010,4 + 823,5 = 2.040$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai persentase rata-rata adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{2.040}{486} \times 100 : 5$$

$$P = \frac{2.040 \times 100}{486 \times 5}$$

$$P = 83,95$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa persentase rata-rata Etos Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng adalah sebesar 83,95% yang tergolong baik. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng selain etika birokrasi baik juga memiliki semangat atau spirit dalam melaksanakan tugasnya yang tertuang dalam nilai etos kerja yang baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Etika Birokrasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng, secara keseluruhan baik, hal ini di indikasikan dari ketiga aspek etika yang digunakan aspek tujuan dan aspek Sarana (modalitas) sudah terlaksana dengan baik, aspek sarana (modalitas) sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

b. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian dan berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat Etos Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng adalah sebesar 83,95% dan ini berada pada interval 76% - 100% atau termasuk dalam kategori **baik**.

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal pokok, sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertindak sesuai aturan atau norma dengan menunjukkan sikap yang wajar setiap anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

b. Perlunya pimpinan untuk rutin memberikan penegasan kepada pegawai negeri sipil untuk merespon apa yang diharapkan anggota DPRD Kabupaten Buleleng untuk selalu berperilaku ataupun bertindak berdasarkan tujuan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryatmoko. 2011. Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: Gramedia
- Ishak Arep, dan Hendri Tanjung , 2003, *Manajemen Motivasi*, PT.Gramedia Mediasarana Indonesia : Jakarta.
- Miless, Mathew B. Dan Michael, A. Haberman, 1994. Analisis Data Kualitatif. UI Press, Jakarta. Moleong, Lexy, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nazir, Mohamad, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Said, Mas'ud . 2009. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.
- Sinamo, Jansen, 2002, *Etos Kerja Profesional*, Darma Mahardika : Jakarta.
- Tebba, Sudirman, 2003. *Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tswawuf*. Cetakan I, Pustaka Nusantara, Bandung.
- Uswatun, Khasanah, 2004, *Etos Kerja : Sarana Menuju Puncak Prestasi*, Cetakan I : Yogyakarta.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Widia, R. (2018). The Influence of Work Motivation to Work Achievement of Employees in PT. Alva Karya Perkasa Bandung. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 42-62.

TABEL**Tabel 1. Rekapitulasi Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Variabel Etos Kerja**

Indikator	Rata-Rata Tanggapan Responden				
	1	2	3	4	5
Motivasi	0	0	14 (17,3%)	43,3 (53,5%)	23,7 (29,2%)
Penilaian Prestasi Kerja	0	0	16 (19,8%)	41 (50,6%)	24 (29,6%)
Peraturan Organisasi	0	0	9,7 (11,9%)	43,3 (53,5%)	28 (34,6%)
Pengaruh Rekan Sekerja	0	0	8 (9,9%)	39,7 (49%)	33,3 (41,1%)
Pengawasan	0	0	3,7 (4,5%)	42,3 (52,3%)	35 (43,2%)
Pembinaan	0	0	17,3 (21,4%)	43 (53,1%)	20,7 (25,5%)
Jumlah	0	0	68,7 (84,8%)	252,6 (312%)	164,7 (203,2)
Rerata	0	0	11,5 (14,1%)	42,1 (52%)	27,4 (33,9%)

Sumber : Hasil Kuesioner